

**ANALISIS KOMPARATIF MODEL IDIOSINKRATIS KEBIJAKAN  
JERMAN DAN INGGRIS TERHADAP PENGUNGS DI MASA  
KEPEMIMPINAN ANGELA MERKEL DAN DAVID  
CAMERON PADA KRISIS PENGUNGS  
TAHUN 2015**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANISA SALSABILA**

**NPM 1916071034**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KOMPARATIF MODEL IDIOSINKRATIS KEBIJAKAN JERMAN DAN INGGRIS TERHADAP PENGUNGSI DI MASA KEPEMIMPINAN ANGELA MERKEL DAN DAVID CAMERON PADA KRISIS PENGUNGSI TAHUN 2015**

**Oleh**

**ANISA SALSABILA**

Penelitian ini menganalisis perbandingan model idiosinkratis dalam kebijakan Jerman dan Inggris pada masa Angela Merkel dan David Cameron khususnya selama krisis pengungsi tahun 2015 dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri pada model analisis idiosinkratis dari Alex Mintz dan Karl DeRoun Jr. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Angela Merkel dan David Cameron, serta mendeskripsikan model ideosinkratis Angela Merkel dan David Cameron terhadap pengungsi di masa krisis pengungsi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Angela Merkel didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan dan tipe pemimpin strategis yang dibuktikan dengan keinginannya untuk mengatasi permasalahan demografi menerapkan “*Open Door Policy*”. Di sisi lain, Inggris dibawah kepemimpinan David Cameron dalam kebijakannya, cenderung lebih pragmatis dan responsif terhadap kekhawatiran publik, dan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati serta terukur dengan memperketat aturan imigrasi dan menggagas referendum Brexit.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa idiosinkratis pemimpin memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Perbedaan pendekatan Jerman dan Inggris mencerminkan konteks politik domestik, prioritas nasional, dan gaya kepemimpinan Angela Merkel dan David Cameron.

**Kata Kunci:** Pengungsi, Kebijakan, Jerman, Inggris, Model Idiosinkratis.

***ABSTRACT***

**COMPARATIVE ANALYSIS OF IDIOSYNCRATIC MODELS OF  
GERMAN AND BRITISH POLICES TOWARDS REFUGEES  
DURING THE LEADERSHIP OF ANGELA MERKEL  
AND DAVID CAMERON IN THE 2015 REFUGEES  
CRISIS**

**By**

**ANISA SALSABILA**

This research analyzes the comparison of the idiosyncratic model in German and British policies during the Angela Merkel and David Cameron periods, especially during the 2015 refugee crisis by using foreign policy theory on the idiosyncratic analysis model of Alex Mintz and Karl DeRoun Jr. This research aims to explain the policies taken by Angela Merkel and David Cameron, and describe Angela Merkel and David Cameron's idiosyncratic model towards refugees during the refugee crisis. This research shows that Angela Merkel's leadership is driven by humanitarian values and a strategic leadership type as evidenced by her desire to overcome demographic problems by implementing the “Open Door Policy”. On the other hand, the UK under David Cameron's leadership in its policies, tends to be more pragmatic and responsive to public concerns, and takes more cautious and measured approach by strengthening immigration rules and initiating a Brexit referendum. The research concludes that leader idiosyncrasy plays a crucial role in shaping a country's foreign policy. The different approaches of Germany and British reflect the domestic political context, national priorities, and leadership styles of Angela Merkel and David Cameron.

Keywords: Refugees, Policy, Germany, British, Idiosyncratic Model.

**ANALISIS KOMPARATIF MODEL IDIOSINKRATIS KEBIJAKAN  
JERMAN DAN INGGRIS TERHADAP PENGUNGS DI MASA  
KEPEMIMPINAN ANGELA MERKEL DAN DAVID  
CAMERON PADA KRISIS PENGUNGS  
TAHUN 2015**

**Oleh**

**ANISA SALSABILA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF MODEL IDIOSINKRATIS KEBIJAKAN JERMAN DAN INGGRIIS TERHADAP PENGUNGGSI DI MASA KEPEMIMPINAN ANGELA MERKEL DAN DAVID CAMERON PADA KRISIS PENGUNGGSI TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : **Anisa Salsabila**

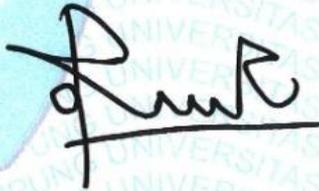
Nomor Pokok Mahasiswa : **1916071034**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

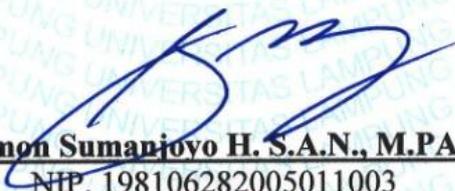
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Gita Karisma, S.P., M.Si.**  
NIP. 198701282014042001

  
**Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 199006062019031019

Ketua Jurusan Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

  
**Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 198106282005011003

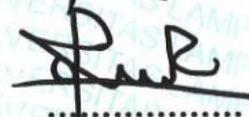
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Oktober 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 8 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



**Anisa Salsabila**

NPM. 1916071034

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anisa Salsabila, dilahirkan di Kota Jakarta pada 16 Juli 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara atas pasangan Bapak Herry Gunawan dan Ibu Marnita (Rahimahallah). Penulis memulai pendidikan awal di Taman Kanak-Kanak (TK) Al Idzhar. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Kubang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Jonggol, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Cileungsi. Penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik, seperti bergabung dalam organisasi *English Society (ESo) Unila* sebagai pengurus HRD Department 2021, menjadi *Liaison Officer Newscasting Competition* di Lovecomp tahun 2020, dan menjadi panitia divisi *Sponsorship International Cultural Festival* tahun 2021. Penulis juga aktif dalam kegiatan di luar kampus, seperti mengikuti kegiatan *Volunteer Social Tour* melalui organisasi non-profit Cakra Abhipraya Responsif. Pada tahun 2022, penulis mengikuti program PKL di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada periode Juni-Agustus.

## MOTTO

*“Tiada daya upaya dan Kekuatan kecuali atas Izin Allah ta’ala”*

**(Q. S. Al Kahfi ayat 39)**

*“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”*

**(Umar Bin al-Khattab)**

*“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu, Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”*

*“Mamaku mempertaruhkan nyawanya demi kelahiranku, maka tidak mungkin jika keberadaanku tidak ada artinya”*

**(Anisa Salsabila)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

### **Papaku Herry Gunawan dan Mamaku Marnita (Rahimahallah)**

Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, serta segala doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan penulis. Skripsi ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan doa yang penulis persembahkan sebagai bukti bahwa Mama dan Papa telah berhasil memberikan yang terbaik untuk pendidikan penulis. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai Papa dan semoga Allah SWT menempatkan Mama di tempat terbaik di sisi-Nya. Meskipun raganya telah pergi, namun semangatnya, nasihatnya, dan doanya tetap menjadi kekuatan yang tak tergantikan. *Barakallahu fiikum*

### **Kakakku Desy Dwi Katrin**

Tulisan ini sebagai bukti kecil dari rasa sayang dan terima kasih penulis untuk kakak tersayang yang selalu memiliki tempat istimewa di hati penulis. Terima kasih atas dukungan baik moril maupun material, doa, dan kepercayaan yang tak pernah henti kakak berikan. Semoga kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan senantiasa menyertaimu. *Jazakillah khairan katsiran.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat anugrah, rahmat, dan kasih-Nya lah skripsi dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul *Analisis Komparatif Model Idiosinkratis Kebijakan Jerman Dan Inggris Terhadap Pengungsi Di Masa Kepemimpinan Angela Merkel Dan David Cameron Pada Krisis Pengungsi Tahun 2015* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Penulis tidak lupa bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai bantuan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terma kasih kepada:

1. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dalam mengingatkan, memberikan bimbingan dan arahan terbaik untuk penulisan skripsi yang lebih baik;
4. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang membimbing serta memberikan saratn terbaik untuk penulisan skripsi yang lebih baik;
5. Mas Iwan Sulistyoyo, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, wawasan baru, nasihat, dan semangat agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi serta untuk kebaikan penulis kedepannya;
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis sejak

awal perkuliahan hingga penulisan skripsi;

7. Papa Herry Gunawan selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun material, semangat, perhatian, doa, serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya;
8. Kak Desy dan Kak Agi selaku kaka-kakak penulis yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih selalu menyediakan tempat beristirahat yang nyaman. Dukungan, doa, dan semangat dari kalian sangat berarti bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan Allah SWT mudahkan segala urusan kalian;
9. Zeline Zahira selaku ponakan yang penulis sayangi, terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis dengan tawa dan keceriaan. Semoga Zeline tumbuh menjadi anak yang cerdas, sholehah, dan membanggakan keluarga;
10. Zalfa Zahirah dan Dita Fatimatuzzahra yang lebih dari sekedar teman bagi penulis, yang telah menjadi keluarga kedua penulis, terima kasih atas semua dukungan, canda tawa, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menjadi tempat bersandar saat penat, motivator saat semangat mengendur, dan penghibur saat rasa putus asa datang. Semoga Allah SWT selalu lindungi jalan kita, mudahkan langkah kita meraih mimpi dan mempertemukan kita kembali dilain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik;
11. Nana, Farraas, Ika, Basa, Viana, Manda, dan teman-teman HI lainnya. Terima kasih sudah berjuang bersama penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini dalam hal perkuliahan mulai dari tugas kuliah hingga urusan skripsi. Sampai jumpa di puncak kesuksesan!
12. Muhamad Aulia Fajrunada, yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, dan kepercayaan kepada penulis;
13. Teruntuk diriku, Anisa Salsabila, Terima kasih sudah berjuang, tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya meskipun tidak mudah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk

menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga hal-hal baik selalu menjadi sahabat dalam keseharianmu, semoga senyum orang tua yang sedang kamu usahakan itu segera menghampirimu. Maka hiduplah kamu dengan keistimewaanmu, maka kuatkanlah kamu diatas segala hal yang mampu membuatmu rapuh, maka hebatlah kamu diatas keraguan orang lain, semoga Allah SWT dan semesta melapangkan hatimu atas segala hal yang sebelumnya terasa berat dan mengecewakan.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 8 Oktober 2024  
Penulis,

**Anisa Salsabila**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.1 Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Landasan Teori dan Konsep.....	18
2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri .....	18
2.2.2 Konsep Pengungsi.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Metode Penelitian .....	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Kebijakan Jerman dan Inggris terhadap Pengungsi masa Kepemimpinan Angela Merkel dan David Cameron .....	32
4.1.1 Sejarah terbentuknya Kebijakan Jerman terhadap Pengungsi Pada Saat Terjadi Krisis Pengungsi 2015.....	35
4.1.2 Sejarah Terbentuknya Kebijakan terhadap Pengungsi di Inggris pada Masa Krisis Pengungsi 2015 .....	47
4.2 Identifikasi Perbandingan Kebijakan Jerman dan Inggris terhadap Isu Krisis Pengungsi Tahun 2015 di Eropa. ....	61
4.2.1 Variabel Idiosinkratis Angela Merkel terhadap Kebijakan Luar Negeri Pengungsi di Masa Krisis Pengungsi Tahun 2015.....	62

4.2.2 Variabel Idiosinkratis David Cameron terhadap Kebijakan Luar Negeri Pengungsi di Masa Krisis Pengungsi Tahun 2015.....	72
4.2.3 Perbandingan Model Idiosinkratis terhadap Kebijakan Pengungsi pada Masa Angela Merkel dan David Cameron.....	82
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 Simpulan .....	92
5.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUTAKA .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Populasi menurut Kolompok Usia dalam Persen di Jerman .....	5
2. Komparasi Penelitian Terdahulu .....	16
3. Perbandingan Indikator Idiosinkratis Pemimpin .....	87

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	27

## DAFTAR SINGKATAN

1. AFD : *Alternative Fur Deutschland*
2. AP1 : *Asylum Package 1*
3. AP2 : *Asylum Package 2*
4. AZR : *Austlanderzentral-Register*
5. CDU : *Christian Democratic Union*
6. CEAS : *Common European Asylum System*
7. CSU : *Christian Social Union*
8. EEC : *European Economic Community*
9. HAM : *Hak Asasi Manusia*
10. IA : *Integration Act*
11. IOM : *International Organization of Migration*
12. IFSD : *Integration Financial Socio-Political Development*
13. NAZI : *National Sozialistische*
14. SIS : *Schengen Information System*
15. TEFUE : *The Treaty on Functioning of the European Union*
16. UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugee*
17. VPRS : *Vulnerable Person Restettlement Schmes*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, isu-isu kemanusiaan menjadi perhatian besar di dalam Hubungan Internasional di mana ketika terjadi suatu peristiwa yang menyangkut keselamatan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan, ataupun ancaman manusia dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Salah satunya adalah isu pengungsi. Pada awalnya isu pengungsi hanya menjadi permasalahan internal suatu negara, namun karena adanya perpindahan pengungsi yang melewati batas negara, membuat permasalahan ini menjadi meluas sehingga menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu. (Wagiman, 2012). Menurut UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) berdasarkan pasal 1 UNHCR tahun 1951, pengungsi merupakan seseorang ataupun sekelompok orang yang meninggalkan wilayahnya dengan membawa rasa ketakutan akibat dari perang, konflik, kekerasan, atau persekusi di mana telah melewati perbatasan internasional guna mencari keamanan di negara lain. Pada dasarnya, pengungsi melarikan diri karena adanya penindasan hak asasi yang mereka alami. Sehingga mereka mencari tempat tinggal baru yang lebih aman dan nyaman (UNHCR, n.d). Sedangkan, menurut Malcom Proudfoot dalam buku Pengantar Hukum Pengungsi Internasional karangan Wagiman menyatakan bahwa pengungsi adalah suatu kelompok yang terpaksa melakukan perpindahan ke tempat lain karena adanya penganiayaan, deportasi, pengusiran orang-orang, dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa (Wagiman, 2012). Berbeda dengan pengungsi, pencari suaka merupakan orang yang meninggalkan negaranya guna mencari perlindungan akibat adanya penganiayaan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius, namun belum diakui secara hukum sebagai pengungsi dan sedang menunggu untuk menerima keputusan atas klaim suaka mereka. Dalam hal ini, mencari suaka merupakan hak tiap orang yang dimana diizinkan memasuki kawasan negara lain untuk

mencari tempat yang lebih aman (Rescue, 2024). Sedangkan, imigran merupakan seseorang yang membuat keputusan secara sadar untuk meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke negara lain dengan tujuan untuk menetap disana. Imigran menjalani proses pemeriksaan yang panjang untuk bermigrasi ke negara baru. Sehingga banyak yang menjadi penduduk tetap yang sah di mata hukum dan akhirnya menjadi warga negara. Para imigran memasuki negara lain dengan membawa tujuan seperti, peluang kerja, mempelajari bahasa negara tempat mereka berencana tinggal, dan imigran bebas untuk pulang ke negara asalnya. Seorang imigran melakukan perpindahan dengan tidak dipaksa untuk meninggalkan negara asal, tidak terjadinya penganiayaan dan kekerasan, akan tetapi melakukan perpindahan ke negara lain guna mencari peluang yang lebih baik. sehingga berbeda dengan pengungsi dan pencari suaka yang memiliki ketakutan beralasan akan penganiayaan yang dialami di negara asal (Amnesty International, 2024).

Untuk mencari kehidupan yang lebih layak, para pengungsi mencoba memasuki kawasan Eropa. Kawasan Eropa menjadi tujuan terbanyak para pengungsi khususnya dari Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena Eropa merupakan kawasan yang sejahtera dan juga memiliki tingkat stabilitas ekonomi yang tinggi sehingga dianggap ideal oleh para pengungsi (Sinambela, 2017). Hal ini juga didukung oleh negara-negara Uni Eropa yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi. Namun Sebagian besar negara-negara di kawasan Eropa menutup pintu untuk para pengungsi dengan alasan adanya krisis ekonomi yang dilanda negara-negara Uni Eropa sehingga tidak mampu menerima dan juga memberikan perlindungan untuk para pengungsi yang datang . Dan pada tahun 2012, sekitar 1.000 pengungsi datang ke Eropa di tiap bulannya. Di tahun 2013, sekitar 700 orang meninggal ketika ingin menyebrangi laut Mediterania. Dan sekitar 350 imigran meninggal di perairan Italia (Gibson, 2014).

Hingga pada tahun 2015, Eropa mengalami krisis pengungsi karena terdapat lebih dari 1 juta pengungsi yang masuk ke kawasan tersebut (Clayton

&Holland, 2015). Selain itu, badan statistik milik Uni Eropa melaporkan bahwa di tahun yang sama, terdapat kenaikan jumlah pengungsi mencapai 1,2 juta untuk mengajukan permohonan suaka di negara-negara Uni Eropa dengan mayoritas berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan (Eurostat, 2016). Pada dasarnya, Eropa telah menerima arus pengungsi sejak lama atas dasar rasa kemanusiaan dan tanggung jawab dalam melindungi manusia di mana hal tersebut telah tercantum pada *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, pada piagam tersebut negara-negara Uni Eropa berkomitmen untuk melindungi dan menegakkan HAM (European Commission, 2014). Namun, dengan adanya gelombang pengungsi yang begitu besar, negara-negara Uni Eropa tidak terlalu mengedepankan pada rasa kemanusiaan seperti apa yang telah di rancang dalam piagam Uni Eropa. Di mana hal ini dilandasi dengan alasan yang mendasar yaitu adanya rasa kekhawatiran yang nantinya akan memunculkan permasalahan dalam negeri. Seperti permasalahan ekonomi, dan juga *culture clash* antara pengungsi dengan masyarakat lokal yang kemudian akan memunculkan penolakan-penolakan sehingga dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara (Dwipayani, et al., n.d). Dalam menangani pengungsi, negara penerima tentu akan mengeluarkan biaya guna mengimplementasikan upaya kemanusiaan yang dibutuhkan. Tidak dipungkiri bahwa negara penerima juga mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana. Sedangkan pengungsi juga memiliki hak terhadap kehidupan yang layak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, adanya pengungsi di negara-negara penerima memberikan dampak yang besar di mana mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik, serta kehidupan bermasyarakat di negara-negara tersebut. Adanya peningkatan populasi dengan tidak diikuti oleh peningkatan produktifitas nantinya akan menjadi bom waktu untuk stabilitas domestik suatu negara. Namun dilain sisi, adanya ketidakstabilan sosial dan tidak terpenuhinya kebutuhan pengungsi juga akan memunculkan dampak baru terhadap pengungsi di mana akan mempengaruhi sosial-psikologisnya seperti trauma, depresi, hingga bunuh diri (Clavelnad, et al., 2012). Karena bagaimanapun juga,

pengungsi sama halnya dengan manusia lainnya yang mempunyai kebutuhan dasar di lingkungan sosialnya seperti, kasih sayang, rasa aman, kesempatan untuk gapai cita-cita, dan diterima oleh masyarakat (Nicholds, 1965).

Jerman yang pada saat itu dipimpin oleh kanselir Angela Merkel justru menerima pengungsi melalui kebijakannya yang dikenal dengan sebutan *Open Door Policy*. Setelah diterapkannya kebijakan ini, Jerman membuka perbatasan selabar-lebarnya. Hingga pada September tahun 2015, pencari suaka yang berusaha untuk memasuki Jerman mencapai 200.000 orang. Dan sepanjang tahun 2015, diperkirakan pencari suaka yang ingin memasuki Jerman mencapai 800.000 orang. Kebijakan *Open Door Policy* merupakan upaya yang dilakukan Jerman guna mengajak negara-negara di Uni Eropa untuk terus mengedepankan isu-isu kemanusiaan sebagai isu yang sensitif. Angela Markel ingin Uni Eropa tidak mengabaikan prinsip-prinsip utama yaitu mengedepankan kebebasan bergerak, serta mengajak negara-negara di Eropa untuk menanggung beban pengungsi bersama. (Yeni, 2019).

Melalui Kantor Federal Jerman untuk Migran dan Pengungsi, Sebagian wilayah Jerman tidak lagi memberlakukan regulasi Dublin untuk pengungsi yang berasal dari negara-negara konflik, khususnya Suriah (Alkousa et al., 2016). Regulasi Dublin merupakan regulasi mengenai negara anggota Uni Eropa yang mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam mengevaluasi permohonan suaka yang ditujukan oleh pengungsi setelah tiba di Eropa dengan pemeriksaan yang ketat (Ammirati, 2015). Terdapat perbedaan antara Regulasi Dublin dan *Open Door Policy* di mana *Open Door Policy* memiliki prosedur penerimaan yang lebih fleksibel. Langkah yang dilakukan Jerman mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Amerika Serikat dan Canada. Selain itu partai-partai yang mendukung pemerintah serta masyarakat Pluralis-liberal di mana mereka memiliki pandangan bahwa sudah sepatutnya pemerintah bertanggung jawab terhadap isu-isu kemanusiaan dengan memberikan perlindungan terhadap para korban perang (BBC, 2016).

Namun, tidak sedikit pula yang berpandangan negatif atas langkah yang diambil Jerman, seperti sebagian masyarakat Jerman yang menolak kebijakan tersebut karena rasa kekhawatiran terhadap pengungsi akibat adanya perbedaan budaya dan ideologi. Pada umumnya, masyarakat Jerman mengalami *Xenophobia* terhadap pendatang baru karena takut akan tersaingi. *Open Door Policy* juga mendapat kritikan dari partai oposisi, yaitu *Alternative für Deutschland* (AfD) dan juga kelompok masyarakat *Patriotische Europaen gegen die Islamisierung des Abendlandes* (PEGIDA) (Ningrum, 2016). Partai ini menganggap bahwa para pengungsi nantinya akan membebani negara dan dapat mengancam masyarakat terlebih lagi kawasan Eropa yang sedang mengalami krisis di mana negara melakukan langkah penghematan serta meningkatnya angka pengangguran (CNN Indonesia, 2015).

Disamping keberhasilan Angela Merkel sebagai kanselir Jerman, negara ini mengalami permasalahan demografi sejak tahun 1980 di mana angka kematian lebih besar daripada angka kelahiran. Pada tahun 1990, angka kelahiran di Jerman hanya mencapai 900 ribu (Destatis, 2022). Selain itu, Jerman juga mengalami peningkatan usia harapan hidup, di mana harapan hidup untuk laki-laki 77 tahun dan perempuan 82 tahun. Dengan begitu dapat diketahui bahwa Jerman mengalami *ageing population* di mana terdapat peningkatan proporsi penduduk usia tua, dan rasio ketergantungan usia tua. Adapun populasi Jerman menurut kelompok Usia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Populasi menurut Kolompok Usia dalam Persen di Jerman

<i>Reference year</i>	<i>Total Number</i>	<i>From... to under... years (%)</i>						
		<i>&lt; 20</i>	<i>20-40</i>	<i>40-60</i>	<i>60-80</i>	<i>80-100</i>	<i>100 and more</i>	<i>&lt;18</i>
2015	82,175,684	18.3	24.5	29.8	21.6	5.7	0.0	16,2
2014	81,197,537	18.2	24.1	30.3	21.8	5.6	0.0	16,1
2013	80,767,463	18.2	24.0	30.7	21.8	5.4	0.0	16,2
2012	80,523,746	18.3	23.9	30.9	21.6	5.4	0.0	16,3
2011	80,327,900	18.4	23.8	31.1	21.4	5.3	0.0	16,4

Sumber: diolah dari (Destatis, 2024)

Dengan permasalahan demografi yang terjadi, Jerman berusaha untuk membangun strategi guna menanggulangi kemungkinan terburuk seperti pertembuhan ekonomi yang melambat yang kemudian mempengaruhi stabilitas dan perekonomian negara. Jerman juga menganggap bahwa *Open Door Policy* dinilai dapat mengurangi terjadinya krisis ekonomi. Di mana Jerman berusaha mencari potensi dari pengungsi yang masuk ke negara tersebut yang nantinya akan memberikan manfaat untuk Jerman dan serta mencapai kepentingan nasionalnya (Dowling, 2019).

Kekuasaan Angela Merkel selama 16 tahun berakhir di tahun 2021. Merkel merupakan pemimpin yang dikenang karena mampu melewati pergolakan dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, serta merupakan pemimpin yang percaya diri dalam menciptakan perdamaian di mana hal ini terbukti melalui kebijakan *Open Door Policy* di tahun 2015 pada awal terjadinya krisis migrasi di Uni Eropa. Setelah kepemimpinan Merkel berakhir, Olaf Scholz terpilih oleh anggota parlemen sebagai kanselir Jerman yang baru. Di dalam pidato perdananya setelah resmi menjabat sebagai kanselir Jerman, Olaf mengatakan bahwa Jerman menjadi negara tujuan utama para imigran dan Olaf berjanji nantinya akan mempermudah para imigran di mana kewarganegaraan kwanegaraan akan diperoleh para imigran apabila telah tinggal di Jerman selama lima tahun (DW, 2022).

Selain Jerman, Inggris juga merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi di mana sebelumnya Inggris juga merupakan bagian dari Uni Eropa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Uni Eropa memiliki komitmen dalam melindungi dan menegakkan HAM yang tercantum pada *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Selain itu, Uni Eropa juga mempunyai kebijakan yang dikenal dengan *Common European Asylum System* (CEAS) di mana kebijakan ini bertujuan untuk membangun perlindungan terhadap pengungsi sesuai dengan hukum internasional. Kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa membuat negara-negara anggotanya untuk memberlakukan kebijakan tersebut di mana setiap anggota Uni Eropa

harus memberikan kesempatan bagi para pengungsi untuk tinggal di negara tersebut (Haliza & Pujiyono 2019). Dengan adanya kebijakan regulasi ini, membuat negara-negara di Uni Eropa mengalami peningkatan jumlah pengungsi, termasuk Inggris. Sebelum Inggris melakukan referendum Inggris menjadi negara kedua terbesar yang menerima pengungsi setelah Jerman dengan jumlah 7,5 juta imigran (Nainggolan, 2016). Adapun awal mula alasan Inggris bergabung dengan Uni Eropa yaitu Inggris yang mengalami krisis minyak di tahun 1973 di mana hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Inggris menjadi rendah. Oleh karena itu, Inggris melihat bahwa dengan bergabung dengan Uni Eropa dapat menjadi harapan untuk mengangkat perekonomian Inggris pada saat itu (Cawood, 2004).

Sama halnya dengan negara Jerman, alasan para imigran melakukan perpindahan ke Inggris yaitu karena Inggris dianggap sebagai negara yang memiliki perekonomian yang tinggi dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Selain itu, Inggris memiliki sistem jaminan sosial yang baik dan menguntungkan. Para imigran yang memasuki Inggris juga merasa persyaratan teknis bahasa Inggris yang lebih mudah (Aya, 2016).

Dengan adanya para imigran di Inggris, memberikan dinamika baru bagi Inggris sendiri, Para imigran di Inggris memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diberikan yaitu salah satunya imigran yang terampil memiliki pengalaman dan keterampilan yang lebih dibandingkan dengan warga Inggris sehingga hal tersebut menutupi kekurangan pekerja yang berasal dari Inggris itu sendiri. Adapun dampak negatif dari keberadaan imigran di Inggris yaitu masyarakat lokal merasa tersaingi dengan banyaknya pekerja yang masuk ke Inggris yang nantinya akan mempengaruhi lapangan pekerjaan. Disamping itu, adanya kasus kejahatan yang dilakukan oleh para imigran membuat masalah baru bagi Inggris.

Adanya kasus kejahatan yang diakibatkan oleh para imigran menjadi ancaman bagi keamanan negara Inggris, terlebih lagi di tahun 2017, sebanyak 26.350

orang yang ingin mengajukan suaka di negara tersebut (Happy Fardian, 2018). Sama dengan negara Jerman, masyarakat Inggris merasa khawatir dengan adanya ancaman terorisme, di mana menurut Lembaga Pew Research Center melaporkan bahwa Inggris yang mengalami krisis pengungsi yang salah satunya disebabkan adanya ancaman terorisme (Lumbantobing, 2016).

Inggris menganggap bahwa Uni Eropa banyak melakukan intervensi melalui kebijakan-kebijakannya. Inggris kerap kali terpaksa mengikuti kebijakan yang diterapkan Uni Eropa walaupun kebijakan tersebut bertentangan dengan kedaulatan yang dimiliki Inggris. Dengan dinamika yang terjadi, membuat Inggris harus mengambil langkah baru guna menjaga keamanan nasionalnya. Krisis pengungsi menjadi kewajiban utama pemerintah Inggris dalam mengatasi ancaman tersebut. Adanya penekanan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Inggris menimbulkan beberapa penolakan dalam kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa. Selain sistem pasar tunggal yang menambah beban ekonomi Inggris meningkat yang menyebabkan jumlah pengangguran bertambah, masalah imigran yang terjadi di Inggris juga menambah kepercayaan diri Inggris untuk melakukan referendum dari Uni Eropa (Yulyan, 2017). Para imigran yang memasuki Inggris telah melampaui batas, sehingga masyarakat beranggapan bahwa dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa setidaknya masalah imigran akan teratasi (Aya, 2016).

Referendum yang dilakukan Inggris terjadi pada 23 Juni 2016. Terdapat lima puluh dua persen masyarakat Inggris yang setuju untuk Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa, pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri Theresa May melakukan revisi kebijakan lama dengan kebijakan yang baru terkait masalah imigran. May mengatakan bahwa pemerintahan Inggris pasca Brexit akan mengadopsi kebijakan serupa dengan kebijakan yang diambil pemerintah Australia mengenai imigran dan pencari suaka. sebagai persyaratannya (Aya, 2016).

Jerman dan Inggris mengalami dinamika imigrasi yang cukup besar. Sejak terjadinya krisis pengungsi di tahun 2015, kedua negara masih menerima masuknya pengungsi walaupun dengan peraturan yang berbeda. Berjalannya waktu, terdapat perubahan-perubahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Inggris dan Jerman. di mana hal ini disebabkan adanya perubahan kepemimpinan dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari masing-masing negara. Walaupun demikian, negara penerima memiliki kepentingan secara politik dengan menerimanya para imigran. Seperti memberlakukan pemberbedayaan komunitas pengungsi yang nantinya akan memanfaatkan kemampuan mereka sehingga dapat memberikan kontribusi dengan menciptakan pekerjaan, bisnis, kesenjangan, dan meningkatkan produktivitas yang menguntungkan negara penerima.

Krisis pengungsi yang tahun 2015 merupakan fenomena global yang signifikan, dan respon negara-negara terhadap krisis ini bervariasi. Penulis menyadari bahwa selama ini belum ada penelitian yang melakukan perbandingan model idiosinkratis yaitu antara Angela Merkel dan David Cameron selaku pemimpin negara Jerman dan Inggris dalam menentukan kebijakan terhadap pengungsi di masa krisis pengungsi tahun 2015. Skripsi ini secara khusus mengkaji bagaimana kepribadian, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai Angela Merkel dan David Cameron mempengaruhi kebijakan pengungsi di negara masing-masing di mana kedua negara tersebut sama-sama menjadi negara tujuan para pengungsi serta pada awal terjadinya krisis pengungsi tahun 2015, Inggris yang masih menjadi bagian dari Uni Eropa pada saat itu juga harus mengikuti peraturan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Keduanya menunjukkan pendekatan yang kontras, sehingga menarik untuk dianalisis dan dibandingkan, di mana pendekatan ini memungkinkan untuk memahami bagaimana faktor individual pemimpin dapat membentuk kebijakan luar negeri. Selain itu, dengan membandingkan kebijakan Jerman dan Inggris, skripsi ini dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang mendasari perbedaan tersebut. Analisis komparatif

memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang respon negara-negara terhadap krisis pengungsi.

Jerman dan Inggris menjadi harapan besar bagi para pengungsi khususnya pengungsi yang berasal dari Timur Tengah di mana menjadi jumlah terbanyak pengungsi di Eropa. Para pengungsi juga membutuhkan tempat untuk membangun komunitas barunya. Hal ini juga harus adanya penyesuaian dan pengintegrasian diri dengan budaya tempat yang ditinggali. Sehingga pengungsi juga dapat beradaptasi agar keberadaan mereka dapat diterima oleh masyarakat setempat ( Pennix, 2004). Lebih lanjut, penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena akan membandingkan kebijakan Jerman dan Inggris terhadap komunitas pengungsi di mana keduanya merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang permasalahan terhadap komunitas pengungsi hingga terjadinya krisis pengungsi di Eropa tahun 2015, Jerman dan Inggris membuka batasannya guna mengedepankan isu-isu kemanusiaan, melindungi persamaan hak, serta mencapai kepentingannya. Di lain sisi, dengan adanya krisis pengungsi di Eropa mempengaruhi stabilitas negara penerima hingga menimbulkan opini negatif publik terhadap pengungsi. walaupun demikian, Jerman dan Inggris tetap menerima pengungsi walaupun adanya perbedaan regulasi. Berkaitan dengan hal tersebut, menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana faktor idiosinkratis dalam kebijakan pengungsi di negara Jerman dan Inggris pada masa Angela Merkel dan David Cameron?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil oleh negara Jerman dan Inggris terhadap komunitas pengungsi pada masa kepemimpinan Angela Merkel dan David Cameron.
2. Mendeskripsikan model idiosinkratis Angela Merkel dan David Cameron dalam kebijakan terhadap pengungsi di masa krisis pengungsi.

### **1.3.1 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat secara akademis: Penelitian ini memberikan analisis mengenai peran idiosinkratis negara Jerman dan Inggris dalam menentukan kebijakan terhadap komunitas pengungsi dengan menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai alat analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka teori dan konsep serta keterbaruan data terkait model idiosinkratis Jerman dan Inggris dalam kebijakan terhadap komunitas pengungsi di masa krisis pengungsi.
2. Manfaat secara praktis: Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran baru terhadap penulis dan pembaca terkait kebijakan yang diambil oleh Jerman dan Inggris sebagai bentuk upaya mengedepankan isu kemanusiaan seperti isu pengungsi namun dilain sisi juga, negara penerima memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Selain itu manfaat lainnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam menyadarkan masyarakat dan aktor internasional mengenai pentingnya sifat menghargai satu sama lain dalam hal ini komunitas pengungsi dan masyarakat internasional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan tinjauan Pustaka yang terbagi menjadi tiga bagian yakni penelitian terdahulu, teori konseptual, dan kerangka pemikiran. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan dan menemukan inspirasi baru terhadap penelitian yang penulis ambil. Pada bagian teori dan konsep terdiri dari penjelasan mengenai teori kebijakan luar negeri, dan konsep pengungsi. Sedangkan pada bagian kerangka pemikiran, penulis memvisualisasikan alur berpikir dalam penelitian dan menjelaskan mengenai pengaruh idiosinkratis negara Jerman dan Inggris dalam kebijakan J terhadap Komunitas Pengungsi di masa krisis pengungsi 2015.

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi penulis untuk memperkaya teori dalam melengkapi penelitian, menemukan inspirasi baru serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang berjudul “Analisis Komparatif Kebijakan Jerman dan Inggris terhadap Komunitas Pengungsi Tahun 2015-2022”. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu, kemudian membuat ringkasannya dengan melakukan Langkah ini, maka akan dilihat sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang memiliki relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Penelitian *pertama* adalah jurnal yang ditulis oleh Tasya Prima Avissa pada tahun 2017 (Avissa, 2017). Jurnal ini memberikan pandangan yang luas dan detail mengenai krisis pengungsi yang terjadi di Eropa. Jerman menjadi salah satu negara yang memiliki sikap pro terhadap komunitas pengungsi dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dimilikinya. Kebijakan yang dimiliki Jerman menawarkan perlindungan massal untuk para pengungsi, khususnya pengungsi yang berasal dari Suriah. Berdasarkan data dari penelitian Avissa,

sejak tahun 2014 kawasan Uni Eropa mengalami krisis pengungsi di mana hampir 1 juta pengungsi membanjiri negara-negara di Eropa. Dan mayoritas pengungsi berasal dari negara-negara yang mengalami peperangan seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Eurostat*, di awal tahun 2015, terdapat peningkatan sebanyak 44% permintaan suaka ke negara-negara di Uni Eropa yaitu mencapai 662,165 jiwa dan 2,024357 jiwa di akhir tahun 2016. Dengan banyaknya pengungsi yang datang ke Eropa, beberapa negara di kawasan Eropa menyatakan ketidaksetujuannya akan kehadiran para pengungsi, namun Jerman mempertahankan kebijakannya untuk tetap menerima pengungsi dengan tangan terbuka.

Penelitian *kedua* adalah jurnal oleh Cuneyt Gurer pada tahun 2019 (Gurer, 2019). Jurnal ini menjelaskan tentang proses integrasi terhadap pengungsi di Jerman melalui perspektif pengungsi di mana berfokus pada pengalaman tingkat individu dan sosial para pengungsi. Di dalam penelitian Gurer, proses integrasi terdiri dari keadaan sebelum kedatangan, kontak pertama dengan petugas resmi proses permohonan suaka, proses integrasi secara resmi, titik masuk sosial dan profesional, serta partisipasi jangka panjang di negara yang di duduki. Adapun keadaan pengungsi pada saat pertama kali datang ke Jerman yaitu sulit untuk menjalin kontak sosial di mana sebelumnya mereka mengalami ketakutan dan trauma terhadap konflik yang dialami di negara asalnya. Sedangkan adanya keterbatasan kontak sosial membuat pengungsi sulit untuk melakukan integrasi. Kemudian adanya ketidakpastiaan tujuan, rute perjalanan, sarana perjalanan, dan risiko selama perjalanan membuat pengungsi berada dibawah tekanan selama proses integrasi.

Penelitian *ketiga* adalah jurnal oleh Lie, Liliana Dea Jovita & Elisabeth Dewi pada tahun 2020 (Jovita dan Dewi, 2020). Jurnal ini memberikan pandangan mengenai kebijakan Jerman terhadap pengungsi melalui *Open Door Policy* sehingga menyebabkan Jerman sebagai negara penerima pengajuan permohonan suaka terbanyak. Partai *Alternatif für Deutschland* (AfD) adalah salah satu pihak yang menolak kebijakan tersebut dimana AfD menciptakan

suatu persepsi bahwa adanya pengungsi yang masuk ke Jerman memberikan ancaman keamanan bagi masyarakat Jerman. AfD sendiri merupakan partai berideologikan nasionalisme etnis di mana mempunyai kepentingan dalam melindungi budaya mayoritas bangsa sehingga bangsa tersebut tetap menjadi homogen secara etnis. Karena ideologi yang dianut, partai AfD memiliki sifat eksklusif terhadap komunitas minoritas tertentu, salah satunya komunitas pengungsi. Maka dari itu, partai AfD melakukan tindakan sekuritisasi di mana menempatkan komunitas pengungsi sebagai *referent subject* yaitu pihak yang mengancam dan masyarakat Jerman sebagai *referent object* yaitu pihak yang terancam. Walaupun banyaknya penolakan dari berbagai pihak, Angela Merkel menegaskan bahwa Jerman haruslah mempertahankan tanggung jawab kemanusiaan.

Penelitian *keempat* adalah jurnal oleh Hardi Alunaza SD & Virginia Sherin pada tahun 2018 (SD dan Sherin, 2018). Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh British Exit terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait imigran. Pada tanggal 23 Juni 2016 Inggris melakukan referendum dari Uni Eropa yang didukung oleh lima puluh dua persen penduduk Inggris. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa mempengaruhi kebijakan mengenai imigran, di mana ini menjadi ancaman bagi para imigran itu sendiri. Uni Eropa yang sangat mendukung permasalahan imigran, mendorong Inggris untuk melakukan referendum dan keluar dari Uni Eropa. Hal ini disebabkan karena banyak imigran yang tidak menaati peraturan yang diterapkan pemerintah Inggris. Selain itu, adanya kecemburuan sosial antara masyarakat Inggris dengan para imigran di mana para imigran berhak untuk mendapatkan fasilitas yang sama baik dalam hal pekerjaan, fasilitas umum, Pendidikan, Kesehatan, dan tempat tinggal. Inggris sendiri menjadi negara dengan penerima terbanyak kedua setelah Jerman dengan jumlah 7,5 juta imigran.

Penelitian *kelima* adalah jurnal oleh Muhammad Najam ud din farani pada tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan Inggris terhadap komunitas pengungsi asal Suriah. Pada Jurnal ini dijelaskan bahwa Inggris

memberikan bantuan kemanusiaan secara finansial untuk para pengungsi internal di Suriah sebesar 321 pound. Selain itu, Inggris juga secara konsisten mendukung kekuatan oposisi untuk melawan rezim Assad. Hal ini didukung dengan Inggris memberikan 67 pound untuk melawan rezim Assad. Selanjutnya Inggris juga memberikan pasukan oposisi sejumlah 3 juta poundsterling untuk menemukan dan menghilangkan senjata kimia yang dimiliki oleh rezim Assad sehingga senjata tersebut tidak dapat digunakan untuk menyerang warga sipil. Pasca terjadinya referendum dan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris. Namun pada di tahun 2015, Inggris memiliki rencana untuk mengembalikan pemukiman pengungsi asal Suriah serta bantuan kemanusiaan secara finansial di Inggris pada tahun 2020. Adapun rencana ini disampaikan oleh David Cameron selaku perdana Menteri pada saat itu.

Penelitian keenam adalah jurnal oleh Resqita Trisya Nurtyandini dan Made Panji Teguh Santoso pada tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan mengenai Inggris yang melihat bahwa permasalahan imigran yang ada di Inggris disebabkan karena Uni Eropa yang menerapkan kebijakan *Open Door Policy* Karena bagian dari Uni Eropa, Inggris diharuskan mengikuti peraturan yang diterapkan oleh Uni Eropa di mana mengharuskan Inggris membuka keamanan perbatasannya bagi imigran. Hal ini menyebabkan meningkatnya imigran yang masuk ke Inggris bahkan menyulitkan Inggris dalam mengontrol imigran yang masuk. Permasalahan imigran ini menjadi salah satu alasan Inggris melakukan referendum pada tahun 2016 yang dilakukan di empat wilayah negara anggota Britania Raya yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara di mana referendum ini dipimpin oleh Perdana Menteri David Cameron.

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Konsep dan Teori	Kesimpulan
Tasya Prima Avissa	Kebijakan Jerman Terhadap Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016	Kualitatif	Konstruktivisme	Adanya konflik di Timur Tengah meningkatkan jumlah pengungsi di Eropa. Sehingga pada tahun 2014, Kawasan tersebut mengalami krisis pengungsi. Sebagian besar pengungsi yang datang berasal dari negara-negara dengan kondisi perpolitikan yang tidak stabil dan sedang mengalami perang. Dan konflik yang terjadi di Suriah menjadi kontributor terbesar gelombang pengungsi di Eropa. Ditengah kecaman negara-negara Uni Eropa yang menolak para pengungsi, Jerman justru membuat kebijakan baru yaitu <i>Open Door Policy</i> . Di mana bantuan yang diberikan Jerman kepada pengungsi merupakan bentuk solidaritas dan rasa bersalah pasca Perang Dunia ke-II.
Lie, Liliana Dea Jovita dan Elisabeth Dewi	Pembentukan Persepsi Pengungsi sebagai Ancaman oleh Partai <i>Alternative fur Deutschland</i> di Jerman.	Kualitatif	Konstruktivisme <i>Non-Traditional Security</i> <i>Sekuritisasi</i>	Adanya migrasi internasional dapat menciptakan suatu ancaman di dalam suatu negara di mana mempengaruhi stabilitas sosial, identitas, budaya, demografi, jaminan sosial, kesejahteraan dan juga keamanan internal maupun nasional. Dari penelitian tersebut juga disebutkan bahwa sekuritisasi dilakukan dan berfokus pada para pengungsi yang beragama Islam dan berasal dari negara-negara Timur Tengah.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Konsep dan Teori	Kesimpulan
<b>Cuneyt Gurur</b>	Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris terkait Masalah Imigran.	Kualitatif	Pengambilan Kebijakan Imigrasi	Proses integrasi terhadap pengungsi di Jerman melalui beberapa fase. Selama proses integrasi para pengungsi mengalami banyak tekanan akibat adanya ketidakpastian yang mereka hadapi. Selain itu, pengungsi yang berada di kamp dengan jangka waktu yang lama akan mempengaruhi pandangan diri pengungsi, sehingga mengurangi rasa percaya diri dan kontak langsung dengan penduduk asli Jerman
<b>Hardi Alunaza SD &amp; Virginia Sherin</b>	Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris terkait Masalah	Kualitatif	Pengambilan Kebijakan Imigrasi	Dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa mempengaruhi kebijakan baru yang dirumuskan oleh pemerintah Inggris terkait dengan masalah imigran. Bagi masyarakat Inggris hal ini akan memberikan berdampak positif agar terhindar dari kecemburuan sosial antara warga lokal dan pendatang. Namun menurut imigran ini menjadi sebuah ancaman kedepannya
<b>Muhammad Najamud din farani, Iram Khalid, M. Rizwan Abbasi</b>	<i>United Kingdoms Foreign Policy towards Syrian Refugees</i>	Kualitatif	<i>Refugees</i>	Bantuan kemanusiaan secara finansial yang diberikan Inggris terhadap komunitas pengungsi Suriah merupakan cara Inggris untuk menghindari intervensi kemanusiaan dan mempertahankan harapan hidup bagi warga Suriah. Namun sejak keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa terdapat perubahan kebijakan yang dilakukan Inggris.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Konsep dan Teori	Kesimpulan
<b>Resqita Trisya Nurtyandini dan Made Panji Teguh Santoso</b>	<i>The Impact of Brexit Referendum on European Union Immigration Policy in the UK</i>	Kualitatif	<i>Immigran Theory</i>  <i>Regionalism</i>	Permasalahan imigran di Inggris disebabkan karena kurangnya kontrol penuh Inggris terkait masuknya imigran ke negaranya. Selain itu, masyarakat Inggris merasa keamanannya menjadi terganggu karena banyak dari imigran yang melakukan tindakan kriminal. Selain itu, pembangunan di Inggris mengalami keterlambatan karena Inggris berusaha untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk imigran. Isu imigran menjadi salah satu alasan Inggris keluar dari Uni Eropa. Dan keluarnya Inggris akan mempengaruhi independensi Inggris dalam perumusan kebijakan. Seperti akses keluar masuk warga negara asing

Sumber: Hasil Rangkuman Peneliti

## 2.2 Landasan Teori dan Konsep

Landasan teori menjadi dasar terpenting dalam penelitian karena berisi seperangkat konsep, definisi, dan proporsi dalam menyelesaikan penelitian. Untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Kebijakan Jerman dan Inggris terhadap Pengungsi di Masa Kepemimpinan Angela Merkel dan David Cameron pada Krisis Pengungsi Tahun 2015, Peneliti menggunakan teori Kebijakan Luar negeri, dan menggunakan satu konsep, yaitu konsep pengungsi.

### 2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah suatu gagasan atau tindakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan guna memecahkan permasalahan atau mempromosikan suatu perubahan-perubahan yang di dalamnya meliputi

kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain (Holsti, 1987). Menurut Jackson and Sorensen, kebijakan luar negeri merupakan tindakan dengan tujuan memandu keputusan pemerintah yang menyangkut urusan eksternal, khususnya hubungan dengan negara-negara asing (Jackson & Sorensen, 2013). Sehingga para pembuat keputusan mempertimbangkan dengan hati-hati rencana tindakan yang diambil untuk kepentingan dan urusan luar negeri.

Kebijakan luar negeri adalah instrumen atau media guna mencapai kepentingan vital suatu negara untuk menjamin terciptanya keamanan dan memaksimalkan kekuasaan (Morgenthau, 1948). Menurut Plano, tujuan kebijakan luar negeri diciptakan untuk mencapai tujuan nasional dengan mengaitkan situasi internasional yang sedang terjadi dan kekuatan yang dimiliki untuk menjangkaunya (Plano, 1999). Tujuan kebijakan luar negeri merupakan citra kondisi suatu negara di masa depan di mana para pembuat keputusan mampu menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain. Dan kebijakan luar negeri mampu bertahan dalam waktu periode tertentu di mana dapat bersifat sementara, dan berubah sesuai dengan situaso dan kondisi pada waktu tertentu.

Sedangkan menurut James N. Rosenau, terdapat lima variabel dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, diantaranya: Variabel individu (idiosinkratik), Variabel group atau peranan (*role*), variabel birokrasi, variable nasional, dan variable sistematis. **Pertama**, variabel individu atau diosinkratik adalah variabel yang berkaitan dengan persepsi, gambaran, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pengaruh idiosinkratik merupakan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pengambil keputusan yang didalamnya terdapat ideologi, kepercayaan, budaya, dan lain sebagainya. Menurut studi Greenstein (1967) dan Winter (2003), karakter pribadi yang dimiliki pengambil keputusan memiliki peran penting dalam bagaimana kebijakan yang

dihasilkan (Dyson, 2006). **Kedua**, Variabel Groups atau peranan adalah gambaran pekerjaan atau aturan yang diterapkan oleh publik kepada kelompok tertentu. Kelompok yang dimaksudkan merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun kelompok lainnya yang memiliki posisi strategis dan memiliki kepentingan tertentu di pemerintahan sehingga berusaha untuk mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat negara. **Ketiga**, variabel birokrasi merupakan variabel yang menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta bagaimana efeknya terhadap politik luar negeri. Dalam variabel ini, kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang meliputi *bargaining*, kompromi, penyesuaian antar biro pemerintah, dinas militer, ataupun divisi lainnya.

**Keempat**, variabel nasional merupakan variabel yang meliputi berbagai atribut nasional yang ikut mempengaruhi hasil politik luar negeri, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kekuasaan, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Adanya interaksi yang terjadi pada unsur-unsur tersebut nantinya akan menciptakan suatu sistem politik, ekonomi, sosial-budaya untuk negara tersebut. **Kelima**, Variabel sistematis merupakan variabel yang melihat bahwa pentingnya pengaruh lingkungan eksternal suatu negara terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut. Lingkungan eksternal tertuju pada keadaan atau sistem internasional yang meliputi struktur hubungan dengan negara-negara besar, regional, aliansi, rezim internasional, hubungan bilateral ataupun multilateral, serta faktor isu dan krisis yang terjadi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel idiosinkratik di mana pengaruh individu dapat menentukan suatu kebijakan. Dalam konteks hubungan internasional, Idiosinkratik mengacu pada karakteristik unik dari individu pengambil keputusan yang kemudian mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Maka dari itu, idiosinkratik menjadi penting dalam menentukan kebijakan luar negeri, tindakan diplomasi, serta perilaku negara dalam suatu sistem internasional.

Menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr (2010) dalam bukunya yang berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*” membahas mengenai tiga indikator yang dijadikan model analisis idiosinkratik guna memahami pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Adapun tiga indikator tersebut antara lain:

1. *Leader's Personality* (Kepribadian Pemimpin) : Indikator ini mengacu pada kepribadian seorang pemimpin yang terbentuk berdasarkan pada proses yang berasal dari persepsi, ingatan, penilaian, pencarian tujuan, ekspresi, dan regulasi emosi. Leaders Personality terbagi menjadi 4 elemen, yaitu:
  - a. Temperamen, yaitu elemen perilaku yang dapat diamati dari tingkat energi dan neurosis.
  - b. Konteks sosial, merupakan elemen yang berhubungan dengan respon individu terhadap gender, kelas, etnis, dan budaya.
  - c. Kognisi, yaitu elemen yang mengacu pada sikap individu dalam merespon konteks kepercayaan, nilai, dan perilaku.
  - d. Motivasi, yaitu elemen yang mengacu pada sikap individu dalam merespon tujuan yang ingin dicapai, kepercayaan diri, serta mempertahankan citra diri.
2. *Leadership Style* (Gaya Kepemimpinan): Indikator ini mengacu pada gaya kepemimpinan individu di dalam pengambilan keputusan. Di dalam bukunya, Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr membagi beberapa gaya kepemimpinan, di antaranya:
  - a. *Goal Driven vs Context Driven*, yaitu gaya kepemimpinan individu yang cenderung menantang permasalahan yang akan dihadapinya dalam memutuskan kebijakan luar negerinya. Pada goal driven, biasanya individu tidak terbuka terhadap informasi baru, sedangkan context driven suka terhadap informasi baru.
  - b. *Task Oriented vs Task Motivated*, pemimpin yang memiliki task oriented tidak ingin merubah posisi ataupun ideologinya.

Sedangkan task motivated cenderung kurang membutuhkan koalisi domestik maupun internasional sebelum mengambil langkah ataupun dalam mempertahankan kebijakan.

- c. *Task Oriented vs Context Oriented*, pemimpin yang memiliki task oriented tidak terlalu sensitif ketika berkaitan dengan konteks politik, namun sebaliknya, pemimpin context oriented sangat sensitif terhadap konteks politik.
3. *Leadership Type (Tipe Kepemimpinan)*, indikator ini mengacu cara pemimpin mempersepsikan kondisi dan informasi pada kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, kepercayaan politik, dan pandangan ideologis. Terdapat beberapa tipe kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:
- a. *Crusader*, pemimpin yang melawan batasan politik namun tertutup pada informasi baru.
  - b. *Incremental*, yaitu pemimpin yang dihadapi dengan masalah atau batasan yang menantang, terbuka untuk informasi, dan fokus pada manuver.
  - c. *Charismatic*, yaitu seorang pemimpin yang ingin memiliki hubungan serta kendala yang menantang dan terbuka untuk informasi, namun dalam hal motivasi berfokus pada hubungan dalam mendorong orang lain untuk bertindak.
  - d. *Strategic*, pemimpin yang *strategic* mempunyai sifat menantang Batasan namun membuka dirinya dalam hal informasi. Pemimpin tipe ini mengetahui apa yang diinginkan serta mencari informasi guna mencapai tujuan-tujuannya.
  - e. *Pragmatic*, tipe pemimpin ini cenderung menghargai kendala politik yang dihadapi namun tertutup terhadap informasi.
  - f. *Directive dan Constative*, tipe pemimpin ini sama-sama menghargai batasan politik namun tertutup mengenai informasi yang akan diterima. Pemimpin *directive* cenderung mengarahkan diskusi kebijakan yang konsisten dengan pandangan pribadi

mereka dan berfokus pada masalah ketika dihadapkan tantangan politik. Sedangkan *consultative* lebih berfokus pada dirinya dan hubungan dengan aktor lain. Maka dari itu akan berhati-hati dalam melacak posisi elit lainnya.

- g. *Reactive dan accomdativ*, kedua tipe ini sama-sama menghargai Batasan dan terbuka terhadap informasi namun memiliki perbedaan motivasi mereka daalam bertindak. Pada tipe reaktif, pemimpin cenderung termotivasi yang berfokus pada masalah yang terjadi dan bijaksana pada setiap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Sementara, pemimpin dengan tipe akomodatid cenderung memilih untuk fokus pada bagaimana membangun hubungan dengan negara lain sehingga berusaha mewujudkan consensus serta meningkatkan akuntabilitas (tanggung jawab).

Teori ini akan membantu peneliti dalam proses penelitian dengan menjadikan pedoman bagaimana peran idiosinkratik mempengaruhi kebijakan Jerman dan Inggris terhadap pengungsi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan kerangka berfikir indikator idiosinkratik dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri dari Alex Mintz dan Karl DeRoun Jr. Teori memiliki fungsi penting bagi peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian koheren dan terstruktur. Dengan demikian, teori memudahkan untuk peneliti mengidentifikasi fenomena secara ilmiah.

### **2.2.2 Konsep Pengungsi**

Di dalam Konvensi 1951, pengungsi merupakan orang-orang yang melakukan perpindahan dari satu tempat ketempat lainnya yang disebabkan karena adanya ancaman akibat dari persekusi di negara asalnya sehingga mereka terpaksa untuk melakukan perpindahan ke negara lain untuk mendapatkan hak atas keamanan diri mereka (Article 1, Geneva Convention 1951). Sedangkan Malcolm Proudfoot

mendefinisikan pengungsi dengan melihat kondisi para pengungsi akibat dari Perang Dunia ke- II. Adapun definisi tersebut yakni:

*These forced movements,.. were the result of the persecution, forcible, deportation, or flight of jews and political apponents of the authoritarians governments; of ethnic population back to their homeland or newly created provinces acquires by war or treaty; the arbitraty rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced labour to bloster the German war effort.*

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengungsi merupakan orang-orang yang pindah ke tempat lain secara terpaksa akibat adanya penganiayaan, pengusiran secara terpaksa, atau pengusiran terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang yang melakukan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pemulangan terhadap etnis tertentu ke negara asalnya atau provinsi baru yang muncul karena terjadi peperangan atau perjanjian, penentuan pembatasan secara sepihak sebelum terjadinya perang; adanya perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran yang disebabkan karena adanya serangan udara dan adanya ancaman dari pihak militer di beberapa wilayah Eropa; penduduk yang melakukan perpindahan secara terpaksa dari wilayah pantai wilayah pertahanan dibawah perintah militer, serta penegembalian tenaga kerja untuk ikut dalam perang Jerman secara paksa. Merujuk pada pasal 1 *UN Convention on the Status of Refugee* 1951, Pietro Verri mendefinisikan bahwa pengungsi merupakan orang-orang yang melarikan diri dari negara asalnya dengan membawa rasa ketakutan guna menghindari ancaman dan penganiayaan (Romsan, 2003).

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah sekelompok manusia yang meninggalkan negara asalnya, pekerjaan, harta, hingga teman yang disebabkan rasa takut serta adanya ancaman keselamatan hidup mereka. Dan pada saat meninggalkan negaranya, biasanya pengungsi tidak membawa dokumen apapun sehingga kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik di negara asalnya ataupun negara tujuan (Romsan, 2003). Sebelum orang-orang yang melakukan perpindahan ke negara lain diakui statusnya oleh instrumen internasional sebagai pengungsi, maka mereka adalah para pencari suaka. Di mana seorang pencari suaka belum tentu seorang pengungsi dan status pencari suaka dapat berubah menjadi pengungsi apabila persyaratan yang telah diatur pada pasal 1 (A) Konvensi tahun 1951 terpenuhi (Sulaiman, 2002). Maka dari itu, perlu adanya perlindungan terhadap para pengungsi untuk meminimalisir adanya ancaman serta kekerasan. Di mana jika seseorang telah diakui sebagai pengungsi, maka terdapat hak-hak melekat pada dirinya serta kewajiban-kewajiban kepada negara yang melindunginya.

Definisi mengenai pengungsi tercantum dalam Konvensi 1951 di mana memiliki kriteria kesertaan (*Inclusion Criteria*). Kriteria ini menjadi acuan para pengambil keputusan dalam pertimbangan dan menentukan status pengungsi. Adapun kriteria tersebut, yakni (UNHCR, 1951).:

1. Berada diluar negara kebangsaannya.
2. Memiliki ketakutan yang beralasan.
3. Penganiayaan.
4. Tidak adanya perlindungan negara.

Adapun yang bertanggung jawab dalam menentukan status pengungsi ialah negara-negara yang berpihak pada Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi. Dimana negara memastikan bahwa para pengungsi benar-benar memperoleh manfaat dari perlindungan internasional sehingga dapat menikmati hak-hak yang melekat pada pengungsi. negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951 juga memiliki

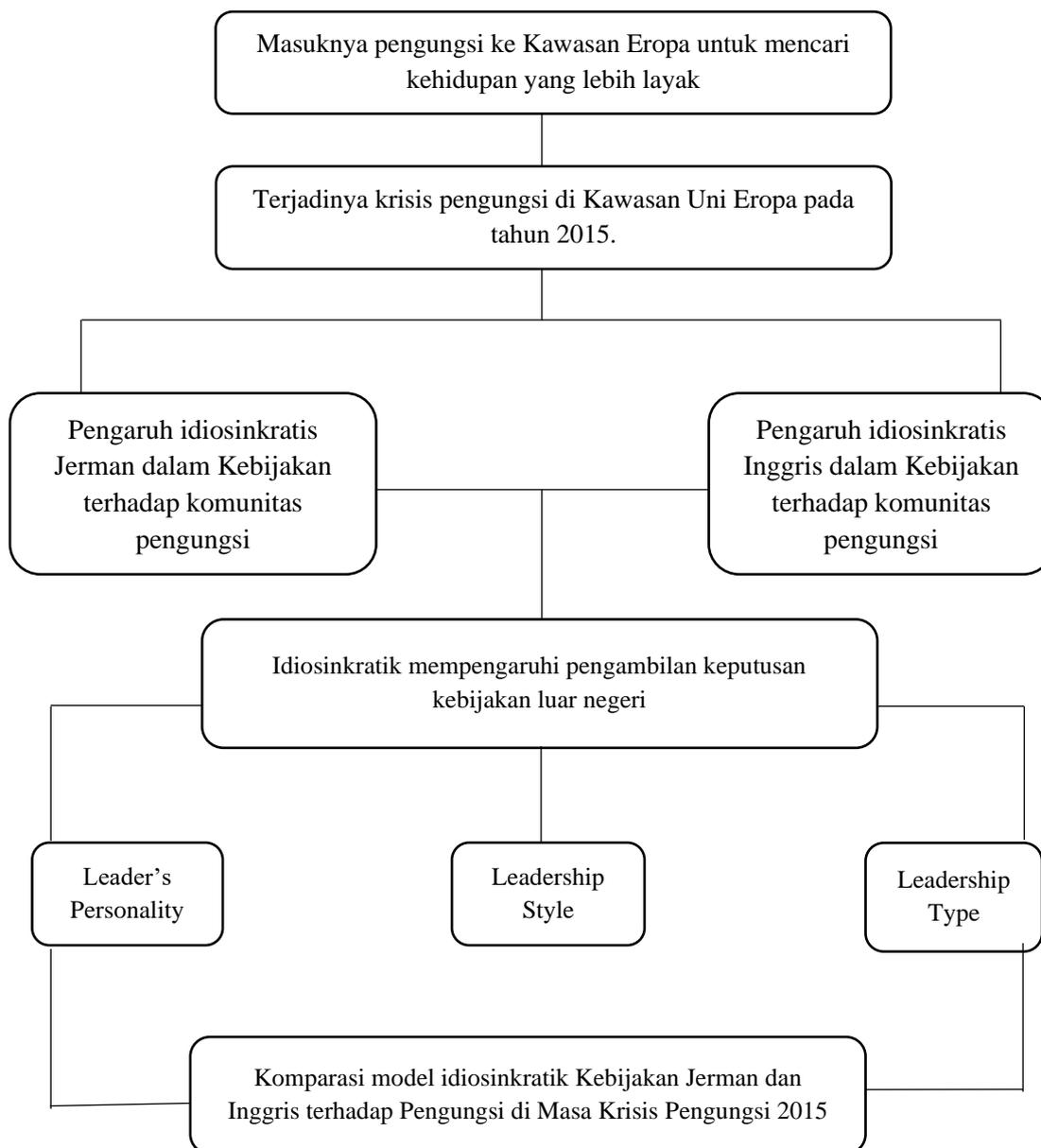
keewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap para pengungsi di mana tidak dapat mengembalikan seseorang ke negara di mana nyata atau kebebasannya terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu keleompok tertentu. Hal ini mengacu pada prinsip *non refoulment* pada pasal 33 Konvensi tahun 1951 yaitu mengenai jaminan suatu negara untuk tidak mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya sebagaimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Selain itu, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) sebagai organisasi internasional memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi serta mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi. UNHCR merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mempunyai mandat khusus dalam melindungi pengungsi di tingkat global (UNHCR, 2003).

Konsep pengungsi ini penulis gunakan untuk menjelaskan fenomena pengungsi yang meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan ke Jerman dan Inggris guna mendapatkan hak dan kewajiban bagi para pengungsi. Tentunya untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut, dibutuhkan aturan yang sesuai dalam menangani pengungsi di mana peraturan tersebut dibuat oleh negara-negara yang berpihak pada Konvensi 1951 tentang pengungsi.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini akan menjelaskan terkait model idiosinkratik berperan dalam kebijakan yang diambil Jerman dan Inggris terhadap komunitas pengungsi pada tahun 2015-2022 dalam mengedepankan isu kemanusiaan. Isu pengungsi menjadi perhatian yang serius karena jumlahnya yang begitu besar. Jerman membuka perbatasannya selebar-lebarnya dan Inggris juga menjadi negara tujuan para pengungsi ketika terjadi krisis pengungsi asal Timur Tengah. Namun dalam kurun waktu tersebut, terdapat dinamika dan perubahan

kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara. Guna menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan dibantu dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut Alex Mintz dan Karl DeRoun Jr (2010) dalam mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara. Selain menggunakan teori kebijakan luar negeri penulis menggunakan konsep pengungsi. Maka dari itu, guna memaparkan kerangka pemikiran dari isu yang sedang diteliti membuat penulis mengambil kesimpulan kerangka berfikir dalam bentuk bagan, sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk kepentingan penelitian

### III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian. Uraian dibagi menjadi lima bagian. Setelah pada bagian pertama menguraikan jenis penelitian, bagian kedua berisi penjabaran fokus penelitian, bagian ketiga adalah penjelasan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, bagian keempat memuat teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data, dan bagian kelima penulis menjelaskan teknik analisis data dalam melakukan penelitian ini.

#### 3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *Comparing Few Countries* dalam menganalisis model idiosinkratis kebijakan Jerman dan Inggris kepemimpinan Angela Merkel dan David Cameron di masa krisis pengungsi tahun 2015. Menurut Todd Landman, perbandingan politik pemerintahan merupakan cara yang dilakukan untuk melihat bagaimana proses dan suatu peristiwa politik pada tingkat domestik suatu negara mempunyai implikasi yang signifikan untuk politik di tingkat internasional. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana perhatian tindakan suatu negara, interaksi negara, dan faktor lain di tingkat internasional yang memberikan dampak pada perkembangan politik domestik. Dalam analisis komparatif juga membahas mengenai perbandingan keputusan, perilaku dan hasil dari kebijakan luar negeri suatu negara dan adanya perbandingan politik akan memunculkan pertimbangan kerangka sebab akibat.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sebuah situasi, pengaturan sosial, atau suatu hubungan sosial secara rinci spesifik serta menekankan pada riset *historical comparative* atau perbandingan sejarah. Pendekatan ini bertujuan

guna meneliti data suatu peristiwa dan keadaan di masa lalu atau di dalam masyarakat yang berbeda (Neuman, 2014). Di dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai analisis komparatif Kebijakan luar negeri Jerman dan Inggris terhadap isu komunitas pengungsi. Pada penelitian kualitatif, teori ataupun konsep digunakan guna menganalisis suatu fenomena atau kasus, sehingga dapat membantu penulis dalam mendeskripsikan hal yang akan diteliti (Bryman, 2012). Maka dari itu, teori kebijakan luar negeri dan konsep pengungsi digunakan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan diambil oleh Jerman dan Inggris.

Pengungsi sendiri merupakan fenomena akibat adanya interaksi di dalam suatu negara sehingga menyebabkan permasalahan sosial ke negara lainnya. dalam hal ini, adanya krisis pengungsi membuat para pengungsi mencari kehidupan yang lebih layak. Penelitian ini nantinya akan mengeksplorasi dan mengidentifikasi secara mendalam. dengan menggunakan alur deduktif, yang artinya penjelasan yang dipaparkan diawali dari umum ke khusus mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil Jerman dan Inggris dalam memfasilitasi para pengungsi yang masuk ke negaranya.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus dalam menjelaskan analisis komparatif model idiosinkratis kebijakan yang diambil oleh Jerman dan Inggris pada kepemimpinan Angela Merkel dan David Cameron di masa krisis pengungsi tahun 2015. Sehingga pada penelitian ini akan berfokus model idiosinkratis yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara sehingga dapat melihat perbedaan dan kesamaan kedua negara tersebut dalam menghadapi komunitas pengungsi. Jerman dan Inggris membuka perbatasannya untuk komunitas pengungsi atas dasar kemanusiaan dan kehidupan yang lebih layak. Penelitian ini akan menggunakan teori dan konsep yaitu teori kebijakan luar negeri dengan instrumen pengaruh pengambilan keputusan oleh Rosenau. Serta konsep pengungsi sebagai penjelasan bagaimana hak dan kewajiban komunitas pengungsi di suatu negara.

Fokus penelitian ini berguna agar penulis memusatkan konsentrasi penelitian terhadap hal-hal apa saja akan digunakan guna menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Selain itu, fokus penelitian digunakan untuk membatasi penghimpunan data sehingga penulis tidak terjebak dalam berbagai data yang diperoleh.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari data yang sudah tersedia oleh peneliti lain (Bryman, 2012). Sehingga data yang didapatkan tidak langsung dari objeknya, baik secara lisan maupun tulisan. Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal ilmiah, berita, laporan, dan berbagai sumber informasi lainnya.

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data spesifik terkait kebijakan Jerman dan Inggris terhadap isu pengungsi hingga upaya keduanya menangani isu pengungsi melalui dokumen, artikel, jurnal, website resmi UNHCR, BAMF, *British Red Cross*, IOM. Selain itu, sumber data yang digunakan penulis dalam melihat perkembangan pengungsi di Jerman dan Inggris sendiri, peneliti menggunakan sumber data dari laman resmi Eurostat. Selain sumber data yang telah disebutkan, penulis menggunakan sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian penulis.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka membantu penulis untuk mendapatkan pemaparan dan informasi terkait model idiosinkratis Angela Merkel dan David Cameron dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil khususnya pada masa krisis pengungsi tahun 2015 melalui buku, artikel, jurnal ilmiah, dokumen, situs resmi seperti UNHCR, *European Commission* dan berita elektronik yang relevan dengan penelitian penulis.

Adapun sumber data yang diperoleh penulis dengan cara penelusuran secara online di internet ataupun buku-buku berbentuk fisik.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis merujuk pada teknik analisis data oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman di mana dalam proses teknik analisis data, terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Pada kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, serta transformasi data. Pada penelitian ini kondensasi data dilakukan dengan memfokuskan data dan informasi terkait kebijakan Jerman dan Inggris serta model idiosinkratis Angela Merkel dan David Cameron sebagai pemimpin dapat mempengaruhi keputusan terhadap kebijakan krisis pengungsi tahun 2015. Langkah selanjutnya yaitu penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang nantinya dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dapat berbentuk kalimat deskriptif, tabel, ataupun grafik. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam melakukan penelitian. Di mana penarikan kesimpulan didasari data yang telah direduksi dan didukung oleh bukti yang kuat pada tahapan pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Dalam kesimpulan ini penulis menjabarkan analisis komparatif kebijakan Jerman dan Inggris terhadap komunitas pengungsi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Eropa mengalami krisis pengungsi di tahun 2015 di mana dengan adanya gelombang pengungsi yang besar, membuat negara-negara di Eropa memberlakukan kebijakan terhadap pengungsi. Namun negara-negara di Uni Eropa juga memiliki kewajiban hukum karena telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Instrumen hukum internasional ini mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan kepada individu yang memenuhi definisi pengungsi, termasuk hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal yang mengancam keselamatan merek. Uni Eropa juga memiliki kebijakan CEAS yang mewajibkan negara Uni Eropa memebrlakukannya. CEAS sendiri merupakan perangkat aturan Uni Eropa yang memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan sistem suaka di Eropa dan memastikan bahwa para pencari suaka diberlakukan secara sama, dimanapun mereka mengajukan permohonan di Uni Eopa.

Keberadaan pengungsi membawa kekhawatiran bagi negara yang diduduki karena nantinya akan memunculkan permasalahan dalam negeri seperti permasalahan ekonomi, dan *culture clash* antara pengungsi dan masyarakat lokal sehingga memunculkan penolakan-penolakan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara kedepannya. Dalam hal ini, pemimpin negara memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan arah strategis mereka dalam menghadapi pengungsi karena mereka memiliki visi, kekuasaan, akses, pengaruh, dan identitas yang memungkinkan mereka untuk membentuk hubungan negara mereka dan dunia.

Penelitian ini membandingkan model idiosinkratis kebijakan Jerman dan Inggris terhadap komunitas pengungsi, terutama selama krisis pengungsi tahun 2015. Jerman dibawah kepemimpinan Angela Merkel menerapkan kebijakan “*Open Door Policy*”. Dalam menerapkan kebijakan ini, Jerman membuka perbatasan selebar-lebarnya dan kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan Angela Merkel guna mengajak negara-negara Uni Eropa lainnya untuk terus mengedepankan isu-isu kemanusiaan sebagai isu yang sensitif. Keputusan Merkel didasari oleh keyakinan kuat akan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral Jerman atas sejarah kelam Holocaust. Selain itu, Merkel juga menginginkan untuk Uni Eropa tidak mengabaikan prinsip-prinsip utama dalam mengedepankan kebebasan bergerak, serta ingin mengajak negara-negara di Eropa untuk menanggung beban pengungsi bersama-sama. Namun dilain sisi, tindakan yang dilakukan Merkel semata-mata juga karena adanya kepentingan nasional di mana Jerman mengalami permasalahan demografi sejak tahun 1980. Maka dari itu, Jerman berusaha untuk membangun strategi guna menanggulangi kemungkinan terburuk serta melambatnya pertumbuhan ekonomi yang nantinya mempengaruhi stabilitas dan perekonomian negara. Angela Merkel melihat bahwa para pengungsi memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan demografi Jerman yang mengalami penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja.

Berbeda dengan Jerman, Inggris dibawah kepemimpinan David Cameron mengambil pendekatan yang lebih pragmatis, terutama selama krisis pengungsi tahun 2015. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, Inggris juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu “*Open Door Immigration Policy*” atau yang dikenal sebagai *Free Movement of Person*. Di dalam perjalanannya, meskipun Inggris masih terikat dengan kebijakan imigrasi Uni Eropa, Cameron melakukan upaya dengan memperketat aturan imigrasi dalam bentuk paket proposal reformasi. Pengajuan ini dilatarbelakangi oleh arus imigrasi yang besar sehingga mengakibatkan dampak negatif seperti masuknya imigran non terampil sehingga tidak

memberikan kontribusi positif bagi Inggris. Cameron juga lebih memperhatikan kekhawatiran publik terkait dampak negatif imigrasi, seperti persaingan di pasar tenaga kerja, dan potensi ancaman keamanan.

Model idiosinkratis Angela Merkel dan David Cameron memiliki persamaan dan perbedaan di mana keduanya menunjukkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada konteks. Keduanya juga terbuka terhadap informasi dan berusaha mencari solusi yang efektif. Namun, Angela Merkel cenderung idealis dan visioner dengan fokus pada isu kemanusiaan dan keuntungan jangka panjangnya. Sementara, David Cameron lebih cenderung pragmatis dengan fokus pada stabilitas dan kepentingan Inggris dengan memperhatikan opini publik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa idiosinkratis pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, terutama dalam menghadapi isu kompleks seperti krisis pengungsi. Kebijakan yang diambil Jerman dan Inggris meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan kepada para pengungsi, menunjukkan pendekatan yang berbeda yang mencerminkan konteks politik domestik, prioritas nasional, dan gaya kepemimpinan pemimpin negara itu sendiri.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis komparatif model idiosinkratis kebijakan Jerman dan Inggris pada masa Angela Merkel dan David Cameron terhadap komunitas pengungsi di masa krisis pengungsi tahun 2015, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk semua pihak yang membaca penelitian ini, agar dapat lebih berhati-hati lagi ketika mengeluarkan pendapat mengenai perbandingan dua objek. Dalam penelitian ini adalah model idiosinkratis Angela Merkel dan David Cameron dalam mengeluarkan keputusan terhadap komunitas pengungsi. Hal ini dikarenakan kedua pemimpin negara tersebut memiliki pendekatan dan cara yang berbeda namun dengan tujuan yang sama atau sebaliknya

ketika sedang menghadapi isu yang kompleks. Sebagai contoh pada penelitian ini, Angela Merkel membentuk *Open Door Policy* dengan alasan mengedepankan isu kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap sejarah kelam Holocaust. Sedangkan, David Cameron memberlakukan *Open Door Immigration* dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan memperhatikan kekhawatiran publik. Sehingga pada prosesnya, Cameron mengajukan paket proposal reformasi yang berisikan tentang pengetatan aturan imigrasi.

2. Untuk pemerintahan Jerman dan Inggris selanjutnya, disarankan untuk kepastiannya dalam proses pengintegrasian pengungsi yang masuk, guna menghindari ketimpangan antara pengungsi dan masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah dan pemimpin negara dapat membangun narasi yang lebih positif terhadap imigran dan pengungsi, serta mempromosikan dialog publik yang masif untuk melawan sentimen anti-imigran dan pengungsi.
3. Kepada akademisi dapat melanjutkan perkembangan pasca periode penelitian serta memperdalam konteks geopolitik seperti bagaimana peran Uni Eropa dalam keputusan Jerman dan Inggris.

## DAFTAR PUTAKA

- Alexander, Lumbantobing. (2016). *Survei: Warga Eropa Kaitan Aksi Kekerasan dan Kedatangan Imigran*.
- Alkousa, R., et al. (2016). *The Making of Merkel's Decision to Accept Refugees*.
- Amandanu, Denny. (2016). *Polandia Membangkang UE, Tolak Terima Pengungsi Internasional*.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160509233735-134-129574/polandia-membangkang-uni-eropa-tolak-terima-pengungsi/>.
- Andreas. (2015). Jerman Kritik Kebijakan Hungaria Terkait Pengungsi Global. [Liputan6.com](http://Liputan6.com).
- Amanda. (2015). *Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman Kepada Imigran?*. CNN Indonesia. [www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/](http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/).
- Ammirati, A. (2015). *What is The Dublin Regulation*.  
<https://openmigration.org/en/analyses/what-is-the-dublin-regulation/>.
- Anshari, M. F., & Rusdiyanta. (2020). *Potensi Dampak Brexit Terhadap Perekonomian Inggris*.
- Arbar, Thea Fathananah. (2021). CNBC Indonesia. *Sah! Olaf Scholz Jadi Kanselir Jerman, Gantikan Angela Merkel*.
- Avissa, Tasya Prima. (2017). *Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aya. (2016). *Brexit Jalan Keluar Atasi Gelombang Imigran*.
- BBC. (2015). *David Cameron And Angela Merkel Hold Eu Reform Talks*. *Bbc News*. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-33245877>
- <https://www.bbc.com/news/uk-politics-33245877>
- Bbc. (2016). *Schengen: Controversial Eu Free Movement Deal Explained—Bbc News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-13194723>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. 4<sup>th</sup> Edition. New York: Oxford University Press

- Cawood, I. (2004). *Britain in the Twentieth Century*. Routledge
- Clayton, J., & Holland, H. (2015). *Over One Million Sea Arrivals Reach Europe in 2015*. UNHCR.  
<https://www.unhcr.org/news/lat%20est/2015/12/5683d0b56/million-%20sea-arrivals-reach-europe-%202015.html>.
- Coplin, William D. (1971). *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Chicago: Markham Publishing Company.
- Darmayadi, Adrias. (2018). *Transformasi Uni Eropa: Prospek Kerjasama Kawasan Pasca Brexit*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol. VIII No. 1.
- Domoskos, J., Taylor, M., Mahmood, M., Topping, A., Tophan L., Khalili, M. (2015). *Calais Migrants: Life in the Jungle-Video*.  
<https://www.theguardian.com/uk-news/video/2015/jul/27/calais-migrants-jungle-camp-video>
- Dowling, S. (2019). *Germany Welcomed Refugees. Now It's Reaping the Economic Benefits*. <https://www.aljazeera.com/economy/2019/6/20/germany-welcomed-refugees-now-its-reaping-the-economic-benefits>
- Dwipayani, I Dewa M,D, et al. (2022) . *Analisis Kebijakan Open Door Policy Jerman di Tengah Krisis Pengungsi di Kawasan Eropa Tahun 2015*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.2 No. 1.
- Darmayadi, A. (2018). *Transformasi Uni Eropa: Prospek Kerjasama Kawasan Pasca Brexit*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 8(1).  
<https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i1.884>
- Dyson, S. (2006). *Personality and Foreign Policy: Tony Blair's Iraq Decisions*. International Association Studies.
- ELSAM. (2014). *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*. Pusat Koleksi pusat Dokumentasi ESLAM.
- European Commission. (2014). *The European Union Explained: Migration and Asylum*. Brussels: Europe.
- Eurostat. (2016). *Asylum in the EU Member State: Record Number of Over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015*.  
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/>
- Faisal, A. (2018). *Upaya Inggris Dalam Menangani Imigran Uni Eropa Pada Masa Cameron Tahun 2014-2016*. *ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 6.
- Ferrel, R. (2018). *Free World*.

- Fransisca, Y., Trihastuti, N., & Roisah, K. (2017). Implikasi Referendum Terhadap Kebijakan Imigrasi United Kingdom. *Dipenogoro Law Journal*.
- Gibson, C.M. (2014). *Hundreds More Desperate Refugees Could Die at Sea as Europe Does Little to Help*. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-conflict-hundreds-more-desperate-refugees-could-die-at-sea-as-europe-does-little-to-help-9380519.html>
- Gov Uk. (2015). *Eu Reform: Pm's Letter To President Of The European Council Donald Tusk*. Gov.Uk. <https://www.gov.uk/government/publications/eu-reform-pms-letter-to-president-of-the-european-council-donald-tusk>
- Gov.Uk. (2021). *Vulnerable Persons And Vulnerable Children's Resettlement Schemes Factsheet, March 2021*. Gov.Uk. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-resettlement-schemes-factsheet-march-2021/vulnerable-persons-and-vulnerable-childrens-resettlement-schemes-factsheet-march-2021>
- Gov.Uk. (2023). *Common Travel Area: Rights of UK and Irish Citizens*. <https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance>
- Grunau, A & Knight, Ben. (2022). *Germany and Immigration: Plans for Reform*. <https://www.dw.com/en/germany-and-immigration-plans-for-reform/a-63925044>
- Gurer, Cuneyt. (2019). *Refugee Perspective on Integration in Germany*. Germany: University of Siegen. Vol.3 No. 2, ISSN: 2576-211.
- Haliza, F. T., & Pujiyono, B. (2019). *Kebijakan Opendoorpolicyoleh Angela Merkel Dalam Kerangka Common Europeanasylumssystem(Ceas) Studi Kasus: Krisis Pengungsi Suriah Di Jerman*. Universitas Budi Luhur.
- Hamilton, Michael. (2016). *Hundreds of Syirians in UK arrested over string of offences including rape and child abuse*. <https://www.thesun.co.uk/news/1528756/hundreds-of-syrians-in-uk-arrested-over-string-of-offences-including-rape-and-child-abuse/>
- Happy, Ferdinan Syah Utomo. (2018). *Cegah Arus Imigran Ilegal Meningkat, Inggris-Prancis Tingkatkan Patroli Bersama*.
- Hecht, D. (2015). *Germany Shuts Its Open Door Immigration*. <https://observer.com/2015/11/germany-shuts-its-open-door-to-refugees/>
- Hill, J. (2015). *Migrant Crisis: Angela Merkel's Deadpan Mask Slips*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-34474153>

- Holsti, K.J. *International Politics*. New Jersey. University of British Columbia Press. 1983.
- IOM. (2017). *Mediterranean Migrant Arrivals Top 363,348 in 2016; Deaths at sea: 5,079*.  
file:///Users/anisasalsabila/Zotero/storage/YC7B89WR/mediterranean-migrant-arrivals-top-363348-2016-deaths-sea-5079.html
- James, N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Jovita, Dea LL dan Dewi, Elisabeth. (2020). Pembentukan Persepsi Pengungsi sebagai Ancaman oleh Partai Alternative fur Deutschland di Jerman. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. Vol.7, No.2, E-ISSN: 2597-9868.
- Khaira, A.N., Yusra, M., & Darmawan, R. (2022). Angela Merkel's Perception and Open Door Policy during The 2015 European Refugee Crisis. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 18 no.1.
- Landman, Todd. *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction (Third edition)*. London. Routledge. 2008.
- Luneto, R. (2021). *Dinamika Uni Eropa: Integrasi Kawasan Dan Referendum Britania Raya*. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 6 No 1.
- Ayoub, M. A. (2019). *Understnading Germany's Response to the 2015 Refugee Crisis*. *Review of Economic and Political Science*.
- Marton, K. (2021). *The Chancellor: The Remarkable Odyssey of Angela Merkel*. Simon & Schuster.
- Mckinney, C. J. (2016). *Explaining The Eu Deal: The 'Emergency Brake.'* Full Fact. <https://Fullfact.Org/Europe/Explaining-Eu-Deal-Emergency-Brake/>
- Migration Observatory. (2024). *People Crossing The English Channel In Small Boats*. <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/people-crossing-the-english-channel-in-small-boats/>
- Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Second Edition*. Sage Publications.
- Minca, Claudio. (2017). *The Balkan Migration Route: Reflections From A Serbian Obvervatory*. *Faculty Of Geography*: University of Belgrade.
- Nainggolan, P. P. (2016). *"Brexit", Penyebab Dan Implikasi Globalnya*. Vol. Viii, No. 12.
- Nanda, B. J., & Permata, I. M. (2017). *Brexit: Pelajaran Bagi Asean*. Vol. 6.

- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7<sup>th</sup> Edition. Pearson.
- Nicholds, Elizabeth. (1965). *A Primer of Social Case Work*. New York, Columbia.
- Ningrum, Andi Arie S. (2016). *Eksistensi Kelompok PEGIDA Serta Propaganda Anti-Pencari Suaka dan Islamfobia di Jerman*. Semarang: Universitas Diponegoro. Vol.2 No. 4.
- Nisa, S. K. (2023). *Kebijakan Inggris Terhadap Masalah Imigran Uni Eropa Pasca Brexit Tahun 2020*. Vol. 11.
- Nurtyandini, Restiqa T & Santoso, Made T. (2022). *The Impact Act of the Brexit Referendum on European Union Immigration Policy in the UK*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. University of singaperbangsa Karawang. Vol.2, No.1. E-ISSN: 27970485
- Page, S. (2021). "The Chancellor": How "pastor's daughter" Angela Merkel became the world's most powerful woman. USA TODAY.  
<https://www.usatoday.com/story/entertainment/books/2021/10/26/chancellor-how-angela-merkel-became-worlds-most-powerful-woman/6087461001/>
- Pries, L., Savci, B. S. Z. (2023). *Syrian Refugee Arriving in Germany: Choice of Corridor and Individual Characteristics of Forced Migrants*. Front Social.
- Putra, I. D. G. P. P., Susanti, S., & Dewi, P. R. K. (2020). *Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa Di Inggris*.
- Plano, Jack C, dan Roy Olton. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Politico. *Angela Merkel Defends Open Border Migration Policy*. (2017).  
<https://www.politico.eu/article/angela-merkel-defends-open-border-migration-refugee-policy-germany/>
- Poushter, J. (2016). *European Opinions of Refugee Crisis in 5 Charts*. Pew Research Center.
- Rahman, F. A. (2021). *Masyarakat Inggris Terhadap Imigran Uni Eropa Dalam Peristiwa Brexit*. Kumparan. <https://kumparan.com/freedom-hitler/masyarakat-inggris-terhadap-imigran-uni-eropa-dalam-peristiwa-brexit-1wlnsq9ai8k>
- Refugees, UNHCR . (T.T.). *What Is A Refugee?* Unhcr.  
<https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html>
- Romsan, Achmad, dkk. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.

- Rosady, F. C. (2016). *Upaya Pemerintah Jerman Dalam menangani Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015-2016*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional.
- Sari, A. P. (2015). *Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman Kepada Imigran?*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran>
- Saviar, Y. M. (2017). *Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional.
- Schmid, C. T. (2016). *Germany's "Open-Door" Policy In Light Of The Recent Refugee Crisis*.
- Sd, H. A., & Sherin, V. (2018). *Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran*. Intermestic: Journal Of International Studies, Volume 2, No, 2.
- Sinambela, S.I. (2017). *Migrant Crisis: Open Door Policy Analisis*. Journal of International Relations. Vol.2 No.1 ISSN: 2528-7192.
- Stefanie, K. (2022). *Keluarnya Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional (Studi Kasus: Referendum Brexit)*. Jurnal Gloria Justitia, Vol. 2 No. 1.
- Sonntag, W. A. (2007). *Mrs Merkel, have you made any mistakes in the refugee issue?* <https://www.welt.de/politik/deutschland/plus168025776/Frau-Merkel-haben-Sie-in-der-Fluechtlingsfrage-Fehler-gemacht.html>
- Sorensen, G., & Jackson, R. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. New York: Oxford University Press.
- Sudaryono, P.A. (2016). *Alasan Inggris Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016*.
- Surya, danty. (2018). *Analisis Kepemimpinan Angela Merkel Selama Menjabat sebagai Kanselir Jerman*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sutrisno, R. D. (2022). *Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Inggris Dalam Mengatasi Masalah Imigran*. Universitas Bosowa.
- The Electoral Commission. (2022, Juli 29). *Report: 23 June 2016 Referendum On The Uk's Membership Of The European Union | Electoral Commission*. <https://www.electoralcommission.org.uk/research-reports-and-data/our-reports-and-data-past-elections-and-referendums/report-23-june-2016-referendum-uks-membership-european-union>

- The Spectator. (2014). *David Cameron's immigration speech: Full text*.  
<https://www.spectator.co.uk/article/david-cameron-s-immigration-speech-full-text/>
- Tirto.id. (2024). *Profil David William Donald Cameron*. tirto.id.  
<https://tirto.id/tokoh/david-william-donald-cameron-nQ>
- Tobing, L. S. (2019). *Hubungan Diplomasi Keamanan Dan Uni Eropa (Ue) Pasca Pernyataan Referendum British Exit (Brexit) Tahun 2016-2017*. Universitas Riau, Vol.6.
- UNHCR. (T.T.). *Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*.
- UNHCR. (2003). *Partnership: An Operations Management Handbook for UNHCR's Partners*. UNHCR. Geneva.
- UNHCR. (2018). *Desperate Journeys*. <https://www.unhcr.org/desperatejourneys/>
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wicaksono, E. R. (2018). *Kebijakan Angela Merkel dalam Mengatasi Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015*. Indonesian Journal of International Relations. Vol. 2, No. 1. ISSN 2548-4109.
- Yeni, M. F. (2019). *Motivasi Jerman Dalam Menerima Pengungsi Suriah pada Tahun 2015*. Vol.1 No. 1 ISSN: 158-201.
- Yurisman, H. (2024). *Perubahan Kebijakan Imigrasi Open Door Menjadi Kebijakan Point Based System Inggris Di Tahun 2016-2023*.